



EDUKASI DASAR HUKUM INDONESIA DI SMA NEGERI 38 JAKARTA

R. Narendra Jatna, Bambang Sugeng Rukmono, Nata Meilani,
Nur Ayudia Hasanah, Syah Alya Wijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

narenjatna@ui.ac.id

bambang.rukmono@stih-adhyaksa.ac.id

nata.meilani@stih-adhyaksa.ac.id

nur.hasanah@stih-adhyaksa.ac.id

syah.wijaya@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Kesadaran hukum pada peserta didik merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku yang tertib, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan serta hasil program edukasi hukum dasar bagi siswa SMA Negeri 38 Jakarta. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan deskriptif melalui metode ceramah interaktif, diskusi terarah, serta analisis kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan siswa. Materi pembelajaran meliputi pengenalan sistem hukum Indonesia, konsep-konsep dasar dalam hukum, fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sosial, serta hak dan kewajiban individu dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk kesadaran mereka mengenai pentingnya menaati aturan dan memahami konsekuensi pelanggaran. Program ini berkontribusi pada penguatan literasi hukum siswa serta mendukung terciptanya budaya sekolah yang lebih taat aturan dan berorientasi pada sikap bertanggung jawab.

Kata Kunci: literasi hukum, kesadaran hukum siswa, hukum Indonesia.

Abstract:

Legal awareness among students is an important aspect in shaping orderly, responsible behavior that is in line with applicable legal values. This study aims to describe the implementation and results of a basic legal education program for students at State Senior High School 38 Jakarta. The activities were carried out using a descriptive approach through interactive lectures, guided discussions, and analysis of simple cases relevant to students' lives. The learning materials included an introduction to the Indonesian legal system, basic concepts in law, the function of law in maintaining social order, and the rights and obligations of individuals in the school and community environments. The results of the activities showed an increase in students' understanding of basic legal principles, including their awareness of the importance of obeying rules and understanding the consequences of violations. This program contributed to strengthening students' legal literacy and supported the creation of a school culture that was more rule-abiding and oriented towards responsible behavior.

Keywords: *legal literacy, student legal awareness, Indonesian law.*



PENDAHULUAN

Pemahaman siswa terhadap dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia merupakan elemen penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan berperilaku sesuai norma. Pada tingkat sekolah menengah, penguatan literasi hukum tidak hanya berfungsi menambah pengetahuan teoretis, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tersebut, edukasi mengenai sistem hukum Indonesia, struktur kelembagaan, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat menjadi relevan untuk diberikan sejak dini. Upaya peningkatan literasi hukum pada siswa SMA berkontribusi terhadap pembentukan generasi yang mampu bersikap kritis terhadap fenomena hukum sekaligus memahami implikasi dari setiap tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

Perkembangan sosial masyarakat yang semakin kompleks, kemajuan teknologi, serta meningkatnya paparan siswa terhadap isu-isu hukum melalui media digital semakin menekankan pentingnya edukasi hukum di lingkungan pendidikan (Setiawan & Pratiwi, 2021). Minimnya pemahaman tentang proses penegakan hukum maupun fungsi lembaga hukum sering menyebabkan siswa memiliki persepsi yang keliru terhadap masalah-masalah hukum yang muncul di sekitar mereka. Oleh karena itu, sekolah berperan strategis sebagai ruang edukatif tempat siswa memperoleh pemahaman yang benar, sistematis, dan kontekstual mengenai hukum nasional.

Kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan di SMA Negeri 38 Jakarta diarahkan untuk memberikan pengenalan komprehensif mengenai sistem hukum Indonesia, termasuk struktur norma, jenis-jenis peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penegakan hukum. Materi ini sekaligus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga ketertiban sosial (Ramdani & Yusuf, 2022). Melalui pendekatan pembelajaran partisipatif,

siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi, simulasi kasus sederhana, serta analisis situasi nyata yang relevan dengan kehidupan remaja.

Selain itu, literasi hukum pada siswa terbukti berperan dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk tindakan yang berpotensi melanggar norma atau peraturan sekolah (Nadhira & Kusumawaty, 2020). Pemahaman hukum membantu siswa menilai suatu tindakan tidak hanya dari perspektif moral, tetapi juga konsekuensi yuridis yang mungkin menyertainya. Dengan demikian, edukasi hukum berfungsi sebagai langkah preventif yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih disiplin dan tertib.

Penguatan literasi hukum juga berhubungan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Ketika siswa memahami bagaimana hukum bekerja dan mengapa sebuah aturan diberlakukan, mereka menjadi lebih mampu mengevaluasi informasi, membedakan yang benar dan keliru, serta menilai isu-isu sosial secara objektif (Mulyadi, 2023). Hal ini sangat penting mengingat siswa SMA berada pada fase perkembangan kognitif menuju pemikiran abstrak dan analitis.

Program pengenalan hukum yang dilakukan di SMA Negeri 38 Jakarta berupaya menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum teoritis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi disusun secara sederhana tetapi tetap berlandaskan prinsip ilmiah agar dapat dipahami oleh siswa tanpa mengabaikan akurasi konsep. Pendekatan seperti ini sejalan dengan rekomendasi berbagai penelitian yang menekankan bahwa literasi hukum perlu dikembangkan melalui metode edukatif yang dialogis dan kontekstual (Rizki & Darmawan, 2022).

Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum bukan hanya memberikan pemahaman normatif tentang sistem hukum Indonesia, tetapi juga menumbuhkan sikap sadar hukum, meningkatkan kedisiplinan, dan memperkuat karakter siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendahuluan ini menjadi dasar bagi



analisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan program edukasi hukum dan dampaknya terhadap peningkatan literasi hukum siswa.

METODE

Kegiatan edukasi hukum ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama agar penyampaian materi mengenai Sistem Hukum Indonesia dapat diterima dengan jelas, relevan, dan aplikatif bagi siswa SMA Negeri 38 Jakarta:

1. Persiapan dan Koordinasi

Tahap awal diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana dan pihak SMA Negeri 38 Jakarta untuk menentukan jadwal kegiatan, jumlah peserta yang akan mengikuti sesi, serta ruang lingkup materi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pada fase ini, tim menyusun perangkat presentasi, modul singkat, serta contoh kasus sederhana yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi disusun dengan fokus pada pengenalan struktur sistem hukum Indonesia, jenis-jenis peraturan perundang-undangan, serta fungsi lembaga penegak hukum. Persiapan dilakukan untuk memastikan penyampaian berjalan runtut, komunikatif, dan relevan dengan tingkat pemahaman siswa sekolah menengah.

2. Edukasi Hukum: Pengenalan Hukum Indonesia

Tahap inti kegiatan berupa pemaparan materi yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai dasar-dasar sistem hukum Indonesia dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat. Substansi materi yang diberikan meliputi:

- Pengertian sistem hukum dan kedudukannya dalam mengatur kehidupan sosial.
- Hierarki peraturan perundang-undangan serta contoh aplikatif yang dekat dengan kehidupan siswa.

- Peran lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- Contoh sederhana situasi pelanggaran aturan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah atau pergaulan remaja.
- Pentingnya kesadaran hukum bagi warga negara, termasuk siswa, dalam menjaga ketertiban sosial.

Materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif, pemutaran ilustrasi visual, serta pembacaan kasus-kasus ringan yang memudahkan siswa memahami penerapan aturan secara nyata. Pendekatan ini dirancang agar peserta tidak hanya mengetahui konsep hukum secara teoretis, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan pengalaman mereka sehari-hari.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada tahap akhir, peserta diberi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait sistem hukum, proses penegakan hukum, maupun isu-isu hukum yang pernah mereka temui. Diskusi dilakukan secara terbuka untuk mendorong keberanian siswa menyampaikan pendapat serta menguji kemampuan mereka dalam memahami konsep yang telah dijelaskan. Selain menjawab pertanyaan, tim pelaksana juga memberikan penjelasan mengenai kontribusi lembaga pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini memperkuat pemahaman siswa melalui dialog dua arah dan mendorong tumbuhnya sikap sadar hukum dalam lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum di SMA Negeri 38 Jakarta menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme tinggi terhadap materi terkait sistem hukum Indonesia dan peran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kegiatan



dimulai, observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar siswa hanya memiliki pemahaman dasar mengenai hukum yang diperoleh melalui mata pelajaran PPKn, sementara pemahaman mengenai struktur hukum nasional, jenis-jenis peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penegakan hukum masih terbatas. Kondisi ini terlihat dari respons awal siswa yang cenderung mengaitkan hukum hanya dengan tindakan pidana atau aparat penegak hukum semata.



Hasil tahap pemaparan materi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman siswa. Melalui penyampaian interaktif, siswa mulai memahami posisi UUD 1945 sebagai norma tertinggi, hierarki peraturan perundang-undangan, serta bagaimana suatu aturan dibentuk dan diberlakukan. Siswa juga dapat menjelaskan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat serta mampu memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan audiovisual membantu memperjelas konsep, terutama ketika memperlihatkan alur pembentukan undang-undang dan contohnya kasus-kasus sosial yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga berdampak pada penguatan sikap kesadaran hukum siswa. Dalam diskusi, beberapa siswa mengaitkan materi dengan pengalaman mereka di lingkungan sekolah, seperti peraturan tata tertib, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, serta pentingnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa materi berhasil dikontekstualisasikan sehingga relevan dengan kehidupan mereka sebagai remaja.

Pembahasan juga menyoroti bagaimana pendekatan dialogis mendorong siswa untuk lebih kritis.

Siswa tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga mempertanyakan logika di balik suatu aturan hukum, alasan mengapa hukum harus dipatuhi, dan bagaimana aturan tersebut berfungsi menjaga ketertiban sosial. Kemampuan berpikir kritis ini merupakan indikator positif dari berkembangnya literasi hukum dalam diri siswa. Beberapa siswa bahkan menunjukkan minat untuk mendalami profesi penegak hukum setelah memahami struktur kelembagaan dan fungsi masing-masing institusi.

Kegiatan tanya jawab menjadi bagian yang paling memperlihatkan perubahan pemahaman siswa. Pertanyaan yang awalnya sederhana berkembang menjadi diskusi yang lebih mendalam, seperti bagaimana proses pelaporan pelanggaran hukum dilakukan, peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, dan pentingnya landasan moral dalam membentuk perilaku patuh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir yang lebih reflektif dan bertanggung jawab.



Secara keseluruhan, kegiatan edukasi hukum ini mampu meningkatkan literasi hukum siswa SMA Negeri 38 Jakarta baik dari segi pengetahuan, pemahaman konteks, maupun pembentukan sikap sadar hukum. Program ini memperlihatkan bahwa ketika hukum disajikan melalui pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan dekat dengan realitas remaja, siswa mampu memahami kompleksitas sistem hukum dengan lebih mudah dan menunjukkan perubahan perilaku serta pola pikir yang lebih kritis dan konstruktif. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai ruang strategis dalam menanamkan pendidikan hukum bagi generasi muda.



KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum Kegiatan edukasi dasar hukum Indonesia yang dilaksanakan di SMA Negeri 38 Jakarta berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa, khususnya dalam memahami konsep-konsep fundamental mengenai aturan hukum, norma sosial, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan dikaitkan dengan situasi nyata yang sering dihadapi remaja, siswa mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran yang relevan dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat, termasuk tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Diskusi dan analisis kasus sederhana membantu siswa menginternalisasi pentingnya mematuhi norma hukum sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya sikap tanggung jawab, keterbukaan, dan kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekolah yang tertib, aman, dan beretika.

Secara keseluruhan, edukasi dasar hukum Indonesia ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan siswa SMA Negeri 38 Jakarta. Penguatan program literasi hukum secara berkelanjutan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari karakter warga negara yang bertanggung jawab.

REFERENSI

Ibrahim, M., Safitri, A., Nurkhiliza, A., & Gea, R. (2025). Peran pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA: Kajian pustaka.

Jurnal Kajian Edukasi dan Pengabdian Masyarakat, 4(1), 22–31.

https://ojsid.my.id/index.php/JKE_PMAS/article/view/500

Latumahina, F., Nurlette, N., & Somar, A. (2023). Enhancing legal awareness among high school students through education and counselling: A case study at SMA Negeri 45 Maluku Tengah, Indonesia. Indonesian Journal of Culture and Community Development, 12(1), 45–56. <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/908>

Listyorini, S., Saputra, D., & Andraini, I. (2022). Penerapan pendidikan hukum pada siswa SMA dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 9(3), 155–166. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/44373>

Ma'arif, A., Nurmalaawati, Y., Unaedi, U., Yuningsih, Y., & Sutisna, S. (2024). Pengaruh pembelajaran hukum dalam meningkatkan kesadaran konstitusional siswa sekolah. Sintesa: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(1), 11–20. <https://sintesa.stkip-arrahmaniyyah.ac.id/index.php/sintesa/article/view/66>

Timoera, L., Casmana, A., Syafrudin, D., & Yasnitia, F. (2023). The student legal awareness against the hazards of smoking for health in school. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 10(2), 101–113. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/17979>